Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional
Vol. 4 No. 2, Juli 2024, Hal 76-90
ISSN 2828-1853 (Online)

Analisis Upaya Sekuritisasi Mesir terhadap *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD)

Ibnu Hafizh[1)], Putu Titah Kawitri Resen[2)], I Made Anom Wiranata[3)]

[1,2,3)] Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

Abstrak

Etiopia pada tahun 2011 mengumumkan dimulainya pembangunan G*rand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD), sebuah bendungan besar yang terletak di daerah hulu Sungai Nil. Pembangunan Bendungan GERD direspons secara negatif oleh Mesir sebagai negara hilir. Mesir khawatir pasokan air Sungai Nil akan berkurang drastis dan mengakibatkan krisis air. Persoalan ini dilihat oleh Mesir sebagai sebuah masalah keamanan, bukan sekadar masalah pengelolaan sumber daya air. Respons yang Mesir berikan dapat dimaknai sebagai upaya sekuritisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya sekuritisasi yang Mesir lakukan terhadap Bendungan GERD dengan menggunakan metode analisis diskursus, teori sekuritisasi dan konsep persegi ideologi. Penelitian ini menemukan bahwa Mesir, melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikannya, menggambarkan Bendungan GERD sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, regional, dan internasional. Upaya sekuritisasi yang Mesir lakukan berfungsi untuk memberi deterens, mengatur agenda organisasi regional dan internasional, serta melegitimasi tindakan di masa depan. Mesir juga berusaha membangun citra baik guna mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. Dukungan tersebut dibutuhkan agar upaya sekuritisasinya berhasil dan bisa memberikan tekanan yang lebih besar kepada Etiopia. Barangkali tujuan utama Mesir melakukan upaya sekuritisasi adalah untuk mempertahankan hegemoninya atas sumber daya air Sungai Nil.

Kata kunci: analisis diskursus, *Grand Ethiopian Renaissance Dam*, keamanan, Mesir, sekuritisasi

Abstract

In 2011, Ethiopia started the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), a large dam located in the upstream region of the Nile River. Egypt was concerned about the significant reduction in the water supply of the Nile caused by the GERD, which could lead to a water crisis. Egypt sees this matter as a security problem rather than just a water resource management issue. Egypt's responses can be interpreted as an effort to securitize the matter. Using discourse analysis, securitization theory, and the concept of ideological square, this research aims to describe the securitization moves undertaken by Egypt towards the GERD. This study found that Egypt, through its statements, portrayed the GERD as a threat to national, regional, and international security. The securitization moves by Egypt functioned to provide deterrence, set the agenda of regional and international organizations, and legitimize future actions. Egypt also sought to build a positive image to gain support from the international society. This support was necessary for the success of its

securitization moves and to exert greater pressure on Ethiopia. Perhaps the main objective of Egypt's securitization efforts was to maintain its hegemony over the water resources of the Nile.

***Keywords**: discourse analysis, Egypt, Grand Ethiopian Renaissance Dam, securitization, security*

Kontak Penulis
Ibnu Hafizh
Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.
Denpasar, 80118
Telp: 089523553900
E-mail : ibnu.hafizh@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Etiopia pada tahun 2011 mengumumkan dimulainya pembangunan sebuah bendungan besar yang terletak di daerah hulu Sungai Nil, tepatnya di Sungai Nil Biru, dekat perbatasan dengan Sudan. Bendungan tersebut dinamai Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Sungai Nil, sebagai gambaran, memiliki dua anak sungai, yaitu Nil Putih yang mengalir dari Burundi dan Nil Biru yang mengalir dari Etiopia (Swain, 1997). Kedua anak sungai bertemu di Khartoum, Sudan, bergabung dan membentuk arus utama Sungai Nil, lalu mengalir ke utara, melewati Mesir, dan pada akhirnya bermuara di Laut Tengah.

Kapasitas penampungan air yang dimiliki Bendungan GERD adalah sebesar 63 miliar m^3. Bendungan ini akan difungsikan sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas produksi mencapai 5 gigawatt (Chen dan Swain, 2014). Pembangunan bendungan ini kurang lebih menghabiskan dana sebesar hampir 5 miliar dolar Amerika. Pendanaan berasal dari berbagai sumber, seperti pinjaman bank domestik dan obligasi (Abtew dan Dessu, 2019). Selain itu, Tiongkok juga memiliki andil di dalam proyek ini dengan memberi pinjaman sebesar 1,8 miliar dolar Amerika (Piliero, 2021).

Pembangunan Bendungan GERD di-respons secara negatif oleh Mesir sebagai negara hilir. Mesir khawatir pasokan air Sungai Nil akan berkurang drastis dan kemudian mengakibatkan krisis air. Persoalan ini dilihat oleh Mesir sebagai sebuah masalah keamanan, bukan sekadar masalah pengelolaan sumber daya air. Respons yang Mesir berikan dapat dimaknai sebagai upaya sekuritisasi. Sekuritisasi, secara singkat, adalah proses terbentuknya isu keamanan. Proses tersebut melibatkan aktor yang menyatakan bahwa suatu masalah merupakan sebuah masalah keamanan dan audiens yang merespons pernyataan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan upaya sekuritisasi yang Mesir lakukan terhadap Bendungan GERD.

Terdapat beberapa karya tulis yang diulas di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah artikel jurnal karya Shimellis Hailu (2018) yang berjudul "Grand Ethiopian Renaissance Dam and Ethio-Egyptian Hydro-Political Relations: The Interplay between Securitization and De-securitization". Dengan teori sekuritisasi, Hailu (2018) berargumen bahwa baik Mesir maupun Etiopia, sama-sama melakukan sekuritisasi dan desekuritisasi. Mesir melakukan sekuritisasi dengan menyebut Sungai Nil sebagai sumber kehidupan bagi Mesir, sedangkan Etiopia, sebaliknya, melakukan desekuritisasi untuk melawan sekuritisasi Mesir.

Penelitian Hailu (2018) memiliki celah pada metode penelitian. Hailu (2018) tidak menggunakan metode analisis diskursus, padahal metode inilah yang seharusnya digunakan di dalam penelitian sekuritisasi. Argumen yang ada di dalam penelitian tersebut juga tidak sejalan dengan teori yang digunakan. Teori sekuritisasi tidak bertujuan untuk memberi penilaian secara objektif ada atau tidak adanya ancaman keamanan dalam suatu kasus (Buzan, Wæver, dan de Wilde, 1998: 33). Hailu

(2018) justru menganalisis fakta dan mitos dari klaim yang dibuat Mesir tentang Bendungan GERD. Dengan kata lain, ia berusaha untuk menentukan apakah Bendungan GERD adalah sebuah ancaman keamanan, seperti klaim Mesir, atau bukan.

Berbeda dari penelitian Hailu (2018), penelitian ini akan berfokus pada upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Mesir dan menggunakan metode analisis diskursus untuk mencoba memahami upaya-upaya tersebut. Penelitian ini juga tidak akan meninjau apakah Bendungan GERD mengancam keamanan Mesir atau tidak. Penelitian berikutnya yang diulas adalah sebuah artikel berjudul "Alasan Pemerintah Etiopia Membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) di Kawasan Sumber Daya Air Lintas Batas Negara" yang ditulis oleh Muhammad Mohdar, D. A. Wiwik Dharmiasih, dan A. A. Ayu Intan Prameswari (2019). Dengan menggunakan konsep keamanan air dan kepentingan nasional, Mohdar, Dharmiasih, dan Prameswari (2019) menjelaskan bahwa Etiopia, sebagai negara hulu, "lebih berupaya memenuhi kepentingan vital dibanding kepentingan lintas batas negara" (hal. 11). Yang dimaksud dengan kepentingan vital dalam konteks ini adalah ketersediaan air dan listrik bagi warga Etiopia.

Pentingnya peran Bendungan GERD dalam menjaga keamanan air dan pasokan listrik nasional membuat Etiopia, tetap mengerjakan proyek bendungan ini hingga selesai, meskipun mendapat tentangan dari Mesir. Etiopia tidak menghiraukan penolakan yang Mesir berikan, sebab yang harus didahulukan, menurut Etiopia, adalah kepentingan nasional.

Penelitian Mohdar, Dharmiasih, dan Prameswari (2019) memiliki sebuah kekurangan, yakni memandang masalah keamanan air sebagai hal yang objektif. Isu keamanan—utamanya yang nontradisional, seperti keamanan air—sebaiknya secara ontologis dilihat sebagai suatu hal yang intersubjektif, yang terkonstruksi secara sosial. Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana keamanan sesungguhnya dipraktikkan. Teori sekuritisasi memungkinkan kita untuk mengkaji konstruksi isu keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi untuk mengisi celah yang terdapat pada penelitian Mohdar, Dharmiasih, dan Prameswari (2019).

Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Teori sekuritisasi ada untuk mengkaji proses suatu isu keamanan terbentuk. Teori ini percaya bahwa isu keamanan adalah hal yang terkonstruksi secara sosial melalui diskursus. Aktor melakukan upaya sekuritisasi dengan menyampaikan wacana/diskursus kepada audiens mengenai adanya ancaman eksistensial (Buzan, Wæver, dan de Wilde, 1998). Melalui diskursus aktor menggambarkan suatu hal sebagai ancaman keamanan serta meyakinkan audiens akan hal tersebut. Kebalikan dari sekuritisasi adalah desekuritisasi, yaitu ketika aktor menyatakan bahwa suatu isu bukanlah isu keamanan.

Sebelum membahas teori sekuritisasi lebih jauh, penting untuk membahas dasar epistemologis dari teori ini. Teori sekuritisasi terinspirasi dari teori tindak tutur yang berargumen bahwa mengatakan sesuatu juga bisa berarti mengerjakan sesuatu (Austin, 1962). Sebagai contoh, ketika seorang pengantin mengucapkan akad nikah, maka ia bukan sedang menginformasikan bahwa ia dan pasangannya menikah, melainkan sesungguhnya ia sedang menikahi pasangannya (Austin, 1962). Dalam konteks sekuritisasi, pernyataan aktor tentang adanya ancaman adalah tindakan untuk mengonstruksikan sebuah isu keamanan. Oleh karena itu, yang dianalisis di dalam penelitian sekuritisasi adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh aktor kepada audiens mengenai suatu isu keamanan.

Searle (1979) membagi tindak tutur ke dalam lima jenis:

1. *Tindak tutur asertif*: digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan, seperti memberikan pernyataan, penjelasan, menarik kesimpulan, atau berhipotesis.
2. *Tindak tutur direktif*: pembicara/aktor berusaha membuat pendengar/audiens melakukan sesuatu dengan cara meminta, memberi perintah, mengajak, dan memberi saran.
3. *Tindak tutur komisif*: bertujuan untuk membuat pembicara melakukan sesuatu, misalnya dengan berjanji atau bersumpah.
4. *Tindak tutur ekspresif*, mengungkapkan perasaan, keadaan psikologis, serta sikapnya terhadap sesuatu, misalnya dengan berterima kasih, mengucapkan selamat, atau meminta maaf.
5. *Tindak tutur deklarasi*: bertujuan untuk mengubah kondisi atau status objek tertentu, misalnya dengan menyatakan perang, memberi vonis kepada terdakwa, atau memecat seorang pegawai.

Wunderlich (1980) berargumen bahwa sebuah tindak tutur dapat terdiri beberapa tindak tutur elementer, sehingga menghasilkan suatu tindak tutur yang kompleks.

Sekarang kita kembali lagi ke teori sekuritisasi. Ketika audiens mengamini pernyataan aktor tentang adanya isu keamanan, maka aktor akan mendapatkan legitimasi untuk melakukan apapun dengan cara apapun yang dianggap perlu untuk bisa menangani isu tersebut. Legitimasi diperlukan sebagai justifikasi atas tindakan luar biasa dan barangkali kontroversial guna mengatasi ancaman (Rena, Putri, dan Resen, 2020). Tindakan yang demikian akan cenderung ditentang masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memastikan usahanya dalam mengatasi ancaman dapat berjalan lancar, aktor berusaha membuat audiens berpikir bahwa ancaman tersebut memang nyata, meskipun sebetulnya ancaman tersebut tidak benar-benar ada. Yang terpenting adalah audiens mengamini pernyataan aktor, sebab dengan begitu audiens akan melegitimasi tindakan aktor.

Mendapatkan legitimasi atas tindakan untuk menetralisasi ancaman hanyalah salah satu tujuan dilakukannya sekuritisasi. Vuori (2008) membagi sekuritisasi ke dalam lima jenis berdasarkan fungsi atau tujuannya. Masing-masing jenis memiliki tiga tindak tutur elementer. Yang pertama adalah mengeklaim: aktor mengeklaim bahwa terdapat suatu ancaman. Yang kedua adalah memperingatkan: aktor memperingatkan akan bahaya dan dampak dari ancaman tersebut. Sementara itu, setiap jenis memiliki tindak tutur dasar ketiga yang berbeda-beda.

1. *Sekuritisasi untuk mengangkat isu ke dalam agenda*. Tujuannya adalah agar suatu isu mendapatkan perhatian khusus dari otoritas tertentu, seperti pemerintah dan organisasi internasional. Tindak tutur ketiga yang dimiliki jenis sekuritisasi ini adalah menyarankan: aktor menyarankan otoritas untuk menangani isu keamanan.
2. *Sekuritisasi untuk melegitimasi tindakan di masa depan*. Ini adalah jenis sekuritisasi klasik yang dikonsepsikan oleh Barry Buzan dkk., seperti yang telah dijelaskan. Dalam sekuritisasi jenis ini, tindak tutur yang ketiga adalah meminta: aktor meminta legitimasi dari audiens.
3. *Sekuritisasi untuk melegitimasi tindakan di masa lalu*. Ini bertujuan untuk memberi justifikasi atas tindakan yang pernah aktor lakukan untuk mengatasi ancaman. Tindak tutur ketiga yang ada pada jenis sekuritisasi ini adalah menjelaskan: aktor berusaha menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan adalah hal yang memang diperlukan.
4. *Sekuritisasi untuk memberi deterens*. Sekuritisasi ini berfungsi untuk menggertak pihak yang dianggap

mengancam, sehingga, jika sekuritisasi berhasil dilakukan, pihak tersebut tidak lagi menjadi ancaman dan aktor tidak perlu mengambil tindakan nyata. Tindak tutur yang ketiga dari jenis sekuritisasi ini adalah mendeklarasikan: aktor mendeklarasikan bahwa aktor tidak akan segan-segan untuk melakukan apapun untuk melawan pihak tersebut.

5. *Sekuritisasi untuk mengambil kendali*. Sekuritisasi juga bisa dilakukan untuk mengendalikan masyarakat melalui perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan dapat mengancam keamanan. Dalam jenis sekuritisasi ini, tindak tutur yang ketiga adalah mewajibkan: aktor mewajibkan audiens untuk mematuhi perintahnya, sebab jika tidak, maka ancaman tidak bisa diatasi.

Penelitian ini menganalisis jenis-jenis sekuritisasi yang dilakukan oleh Mesir. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi tiga tindak tutur elementer yang terdapat dalam pernyataan-pernyataan Mesir mengenai Bendungan GERD. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang upaya sekuritisasi yang Mesir lakukan.

Selain teori sekuritisasi, penelitian ini juga menggunakan konsep persegi ideologi (*ideological square*) yang dikemukakan oleh Teun A. van Dijk. Ideologi, menurut van Dijk (1998) direproduksi, salah satunya, melalui diskursus. Konsep ini menganalisis ada atau tidaknya informasi yang mencerminkan ideologi tertentu di dalam sebuah diskursus.

Ideologi direproduksi melalui representasi Kami (*Us*) dan Mereka (*Them*) di dalam diskursus. Hal ini dilakukan dalam empat langkah: (1) menonjolkan informasi positif tentang Kami, (2) menonjolkan informasi negatif tentang Mereka, (3) mengesampingkan informasi negatif tentang Kami, (4) mengesampingkan informasi positif tentang Mereka. "Kami" merujuk pada pihak-pihak yang aktor wakili, sedangkan "Mereka" adalah siapapun yang berseberangan dengan aktor. Tujuan dari menonjolkan informasi tertentu dan mengesampingkan informasi lain adalah untuk sedemikian rupa merepresentasikan Kami, dengan harapan mendapat simpati dari audiens. Sebaliknya, audiens diharapkan menjauhi Mereka akibat dari representasi tersebut.

van Dijk (1998) menjelaskan bahwa sebuah struktur diskursus (ada/tidak adanya informasi tertentu) berfungsi secara ideologis pada konteks tertentu, tetapi pada konteks lain tidak. Konsep persegi ideologi peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan ada dan tidak adanya suatu informasi di dalam diskursus yang mencerminkan kepentingan tertentu. Dalam kasus ini adalah kepentingan Mesir.

Konsep persegi ideologi tentu tidak akan berdiri sendiri di dalam penelitian ini. Konsep ini dipakai untuk membantu mendeskripsikan upaya sekuritisasi Mesir terhadap Bendungan GERD. Dengan begitu, penelitian ini bisa memberikan analisis yang lebih mendalam.

	Informasi positif	**Informasi negatif**
Kami	Ditonjol-kan	Dikesam-pingkan
Mereka	Dikesam-pingkan	Ditonjol-kan

Bagan 1. Persegi Ideologi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya-upaya yang Mesir lakukan dalam menyekuritisasi Bendungan GERD milik

Etiopia. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menentukan apakah Bendungan GERD adalah ancaman atau bukan. Teori sekuritisasi digunakan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Mesir untuk mengemas isu Bendungan GERD sebagai isu keamanan. Konsep persegi ideologi digunakan untuk menganalisis cara Mesir dalam merepresentasikan dirinya dan Etiopia di dalam diskursus.

METODE

Metode yang penelitian ini gunakan adalah analisis diskursus, yaitu metode yang berfungsi untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks tertentu (Brown dan Yule, 1983). Di dalam penelitian ini, metode analisis diskursus digunakan untuk menginterpretasikan teks-teks atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan Mesir mengenai Bendungan GERD. Peneliti berusaha menemukan kata-kata tertentu yang berhubungan dengan konsep keamanan, seperti "keselamatan" dan "kestabilan." Penggunaan kata-kata tersebut mengindikasikan adanya upaya sekuritisasi.

Peneliti mengumpulkan data-data berupa teks yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel ilmiah, artikel berita, dokumen resmi, dan sebagainya. Data yang penelitian ini gunakan paling banyak bersumber dari artikel berita. Peneliti juga mengumpulkan data dari unggahan media sosial.

Beberapa teks yang dianalisis tertulis dalam bahasa Inggris. Sebagian merupakan terjemahan dari bahasa Arab—terutama teks yang diperoleh dari artikel-artikel berita, dan sebagian lain bentuk aslinya memang berbahasa Inggris. Teks-teks tersebut akan tetap ditulis dalam bahasa Inggris untuk mengurangi perubahan makna. Sementara itu, teks-teks yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bantuan kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT. Tujuannya adalah agar teks-teks tersebut dapat dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2013 Muhammad Mursi yang waktu itu masih menjabat sebagai Presiden Mesir, sebagaimana diberitakan oleh Reuters, dalam satu kesempatan, menyampaikan bahwa, "*Egypt's water security cannot be violated in any way,*" dan bahwa, "*As head of state, I confirm to you that all options are open*" (Perry dan Macdonald, 2013). Ia juga menyatakan, "*We are not calling for war, but we will never permit our water security ... to be threatened,*" dan "*If it diminishes by one drop then our blood is the alternative*" (Perry dan Macdonald, 2013).

Melalui pernyataan tersebut, Presiden Mursi secara eksplisit mengaitkan Bendungan GERD dengan keamanan. Kita bisa menemukan beberapa kata yang berhubungan dengan keamanan, yaitu "*water security*", "*war*" "*threatened*", dan "*our blood*". Dengan pernyataan-pernyataan di atas, Presiden Mursi berusaha meyakinkan Etiopia bahwa membangun bendungan di hulu Sungai Nil adalah ide yang buruk dan ini dapat memicu perang antara kedua negara.

Pernyataan Presiden Mursi di atas bisa dikategorikan sebagai sekuritisasi yang berfungsi sebagai deterens atau gertakan. Pertama, ia mengeklaim sekaligus memperingatkan Etiopia bahwa pembangunan Bendungan GERD adalah pelanggaran terhadap keamanan air Mesir. Lalu ia mendeklarasikan atau menegaskan bahwa Mesir akan melindungi keamanan airnya, meskipun itu harus dibayar dengan darah.

Pernyataan yang disampaikan Presiden Mursi mungkin bisa dimaknai sebagai upaya desekuritisasi, sebab ia menyatakan bahwa, "*all options are open*" dan "*we are not calling for war*." Kedua kalimat itu bisa berarti bahwa Mesir ingin masalah ini diselesaikan dengan cara apapun,

kecuali perang. Dengan kata lain, Mesir tidak menganggap ini sebagai masalah keamanan. Namun, jika kita melihat kalimat lain di dalam pernyataannya, Presiden Mursi jelas menyatakan bahwa ini adalah problem keamanan. Ini adalah sebuah kontradiksi. Teks-teks lain juga jika diperhatikan mengandung kontradiksi yang serupa. Namun, kita simpan dulu persoalan ini untuk dibahas di bagian selanjutnya.

Pada tahun 2017 Presiden Abdul Fattah as-Sisi, melalui pidatonya di muka warga Mesir menggambarkan masalah Bendungan GERD sebagai persoalan hidup dan mati ("*A matter of life or death for the nation*") dan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh mengambil air milik Mesir ("*No one can touch Egypt's share of water*") (Egypt Today, 2017). Presiden as-Sisi memang tidak secara nyata mengatakan bahwa ini adalah isu keamanan. Akan tetapi, pernyataan di atas menyiratkan demikian. Presiden as-Sisi menggambarkan problem ini sebagai hal yang menyangkut kelangsungan hidup bangsa Mesir, yang mana ini juga berkaitan dengan keamanan.

Upaya sekuritisasi ini bertujuan untuk memberi deterens kepada Etiopia. Presiden as-Sisi mengeklaim Bendungan GERD adalah ancaman terhadap eksistensi Mesir. Oleh karena itu, ia memperingatkan Etiopia untuk tidak melanggar hak Mesir atas sumber daya air Sungai Nil. Tindak tutur deklarasi tidak disampaikan secara eksplisit di dalam pernyataan Presiden as-Sisi. Namun, pernyataannya tentang masalah hidup dan mati menyiratkan bahwa Mesir akan melakukan apapun untuk mempertahankan keamanannya.

Pada Juni 2020 Mesir membawa masalah ini ke dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, di dalam pidatonya mengatakan, "*The Grand Ethiopian Renaissance Dam … could endanger the security and very survival of an entire nation*" (Edrees, 2020: 2). Kita bisa melihat pada kalimat tersebut Sameh Shoukry dengan jelas menyatakan bahwa GERD adalah ancaman serius. Selanjutnya ia juga mengatakan, "*This eventuality represents a serious threat to international peace and security*" (Edrees, 2020: 6). Sameh Shoukry juga berargumen bahwa masalah Bendungan GERD dapat menjadi ancaman, bukan hanya bagi Mesir, melainkan juga bagi keamanan dan perdamaian dunia. Ia ingin menunjukkan betapa besarnya konsekuensi yang ditimbulkan konflik ini.

Sameh Shoukry kemudian memohon agar Dewan Keamanan PBB serta masyarakat internasional turun tangan dan berperan aktif mengatasi isu ini:

> "*It is therefore necessary for the Security Council and the international community to exert every effort and support every initiative that is intended to lift this looming threat and remove this ominous peril on the horizon*" (Edrees, 2020: 6).

Selaras dengan kalimat sebelumnya yang menggambarkan isu ini sebagai isu keamanan global, Sameh Shoukry dengan kalimat tersebut meminta dukungan Dewan Keamanan PBB dan negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang berlangsung selama lebih dari satu dekade ini.

Pidato yang Sameh Shoukry sampaikan di dalam sidang Dewan Keamanan PBB bertujuan untuk mengangkat isu ke dalam agenda. Sameh Shoukry berusaha meyakinkan Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan isu Bendungan GERD ke dalam agendanya. Dengan begitu, Mesir akan mendapatkan dukungan yang besar yang dapat memberi keuntungan bagi Mesir untuk menghadapi Etiopia.

Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Sameh Shoukry merupakan sekuritisasi yang bertujuan untuk mengangkat isu ke dalam agenda. Hal ini bisa dilihat dari tindak tutur yang terdapat di dalam pidatonya. Pertama ia

mengeklaim bahwa Bendungan GERD mengancam keamanan Mesir, lalu memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa konflik ini berpotensi menjadi gangguan terhadap perdamaian internasional. Terakhir ia menyarankan dewan tersebut dan masyarakat internasional untuk turut berkontribusi dalam upaya resolusi konflik.

Dalam satu kesempatan di bulan Maret 2021, Presiden as-Sisi menyatakan bahwa dirinya tidak menakut-nakuti siapapun ("*I'm not threatening anyone here, our dialogue is always reasonable and rational*") (Aljazeera, 2021). Dirinya lalu menegaskan bahwa tidak ada yang boleh mengambil air yang menjadi hak Mesir, walau hanya setetes ("*I say once again no one can take a drop from Egypt's water, and if it happens there will be inconceivable instability in the region*") (Aljazeera, 2021). Kemudian Presiden as-Sisi juga menyatakan bahwa reaksi yang Mesir berikan jika benar terjadi krisis air akibat Bendungan GERD akan berdampak pada stabilitas regional ("*Any act of hostility is detestable … but our reaction in the event that we are affected will affect the stability of the entire region*") (Aljazeera, 2021).

Presiden as-Sisi, melalui pernyataan di atas berusaha mengemas isu ini sebagai isu regional yang akan mengganggu kestabilan kawasan Afrika, khususnya kawasan Basin Sungai Nil dan Tanduk Afrika. Upaya sekuritisasi ini dapat dikategorikan sebagai sekuritisasi yang bertujuan untuk melegitimasi tindakan di masa depan. Sekuritisasi ini terdiri dari tindak tutur mengeklaim, memperingatkan, dan meminta. Dengan jelas Presiden as-Sisi mengeklaim hak Mesir atas sumber daya air Sungai Nil dan kemudian memperingatkan Etiopia untuk tidak melanggar hak tersebut jika ingin kawasan Afrika tetap stabil.

Selanjutnya Presiden as-Sisi secara tersirat meminta persetujuan dari para audiens. Ia berusaha meyakinkan audiens bahwa tindakan tegas yang mungkin akan Mesir lakukan, yang berpotensi menyebabkan instabilitas kawasan, adalah reaksi yang bertujuan untuk melindungi hak Mesir. Ia tidak mau negaranya disalahkan atas ketidakstabilan yang akan terjadi, sebab menurutnya adalah Etiopia yang menyebabkan masalah ini terjadi.

Sameh Shoukry pada pertengahan 2021 menghadiri sidang Liga Arab dan menyampaikan pidato sebagai perwakilan Mesir. Teks pidato berbahasa Arab tersebut diunggah ke Facebook oleh akun resmi Kementerian Luar Negeri Mesir. Dengan bantuan ChatGPT, teks tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam pidatonya, Sameh Shoukry menyampaikan:

> "Mesir mengemukakan isu eksistensial ini kepada Dewan Menteri Liga Arab dengan berangkat dari dampak masalah ini terhadap keamanan nasional Arab. Hal ini tidak seharusnya dianggap sebagai upaya untuk menciptakan persekutuan yang ditujukan melawan negara saudara di Afrika, tetapi merupakan permintaan yang didasarkan pada pentingnya solidaritas Arab dalam melindungi keamanan nasional kita" (Halaman Resmi Kementerian Luar Negeri Mesir, 2021).

Melalui pidatonya Sameh Shoukry berusaha mengemas isu ini sebagai isu regional. Menurutnya masalah yang ditimbulkan Bendungan GERD adalah sebuah masalah eksistensial yang mengancam keamanan negara-negara Arab, bukan hanya Mesir. Ia kemudian menyatakan bahwa solidaritas negara-negara anggota Liga Arab dibutuhkan untuk menjaga keamanan regional.

Pidato di atas bisa dipahami sebagai sekuritisasi yang berfungsi untuk mengatur agenda. Sameh Shoukry mengeklaim bahwa Bendungan GERD merupakan ancaman eksistensial dan memperingatkan Liga Arab akan dampaknya terhadap keamanan kawasan

Arab. Selanjutnya ia menyarankan agar negara-negara anggota untuk menjaga solidaritas mereka untuk melindungi Dunia Arab dari ancaman keamanan.

Hasil yang diharapkan dari upaya sekuritisasi ini adalah isu Bendungan GERD menjadi bagian dari agenda Liga Arab. Dengan begitu, Mesir akan mendapatkan dukungan dari organisasi regional tersebut. Dukungan ini penting untuk memberi tekanan kepada Etiopia di meja perundingan.

Pada Juli 2021, Mesir kembali membawa isu Bendungan GERD ke dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Setelah sidang selesai, diadakan sebuah konferensi pers di mana Sameh Shoukry berkomentar mengenai Bendungan GERD dan menjawab sejumlah pertanyaan dari para jurnalis. Video konferensi pers dapat diakses melalui kanal YouTube resmi PBB.

Dalam konferensi pers tersebut Sameh Shoukry mengatakan:

> "*The unilateralism that is being displayed by Ethiopia threatens the water security of Egypt and Sudan. It does imperil the livelihoods of 150 million inhabitants, and we have not sense that there is a political will on the part of Sudan*" (United Nations, 2021).

Unilateralisme yang dimaksud adalah tindakan Etiopia mengisi waduk Bendungan GERD untuk tahap kedua yang kebetulan pada saat itu sedang dilakukan. Mesir merasa tidak dilibatkan dalam proses pengisian tahap kedua ini, sehingga Sameh Shoukry menyebut Etiopia telah bertindak secara sepihak. Di samping itu, secara umum Etiopia tidak melibatkan Mesir dalam proses pembangunan Bendungan GERD. Oleh sebab itu, unilateralisme juga bisa merujuk pada keseluruhan proyek Bendungan GERD.

Sameh Shoukry juga menyatakan bahwa dibutuhkan sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk mengurangi potensi konflik:

> "… *The fifteen members [of UN Security Council] have indicated in their statements that they are supportive of the reinitiation of negotiation under the auspices of the African Union … that might bring the countries to an equitable and legally binding agreement … that defuses the potential escalation of conflict that will have dire consequences on the region and on the African continent as a whole*" (United Nations, 2021).

Upaya sekuritisasi yang Sameh Shoukry lakukan ini bisa dilihat sebagai sekuritisasi deterens. Ia mengeklaim bahwa Bendungan GERD adalah ancaman keamanan. Kemudian ia memperingatkan dampak yang bendungan tersebut timbulkan, yaitu terancamnya kelangsungan hidup 150 juta warga Mesir dan Sudan. Terakhir ia mendeklarasikan dan menegaskan bahwa Mesir akan terus bernegosiasi hingga tercapai sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum, sebab jika kesepakatan yang demikian tidak tercapai, maka akan timbul konflik yang akan berdampak secara luas terhadap Benua Afrika. Dengan upaya sekuritisasi ini, Mesir berusaha meyakinkan Etiopia bahwa bertindak secara sepihak bukanlah pilihan yang tepat, sebab ini akan mengancam kehidupan 100 juta lebih orang dan kestabilan regional.

Pada awal Maret 2023 Mesir menjadi tuan rumah sidang Liga Arab. Di dalam sidang yang diadakan pada level menteri tersebut Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, menyampaikan pidatonya. Terdapat beberapa hal yang disinggung oleh Sameh Shoukry dan salah satunya adalah Bendungan GERD:

> "Saya juga tidak dapat melewatkan untuk membahas isu sentral yang memiliki prioritas tinggi dan memiliki konsekuensi fatal terhadap keamanan nasional Mesir, yaitu bahaya praktik-praktik sepihak Ethiopia yang merugikan pada cekungan sungai yang dimiliki bersama, dan

> Bendungan Renaisans Etiopia merupakan manifestasi utamanya saat ini. Hal ini terjadi karena Etiopia terus melakukan pembangunan dan pengisian bendungan ini tanpa mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum dengan negara-negara hilir yang mengatur hal tersebut, termasuk dalam pengoperasiannya." (Halaman Resmi Kementerian Luar Negeri Mesir, 2023).

Sameh Shoukry menyebut Bendungan GERD dapat memberi dampak yang fatal kepada Mesir. Ia juga mengatakan bahwa tindakan sepihak Etiopia telah merugikan negara-negara Basin Sungai Nil. Dengan kata lain, Sameh Shoukry ingin meyakinkan audiens bahwa Bendungan GERD bukan hanya berdampak negatif terhadap Mesir, tetapi juga terhadap negara-negara lain di sepanjang aliran Sungai Nil. Oleh karena itu, Sameh Shoukry berargumen bahwa solusi atas permasalahan ini adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Dalam pidato tersebut, Sameh Shoukry juga, lagi-lagi, menekankan pentingnya peran yang Liga Arab miliki dalam upaya penyelesaian konflik ini:

> "Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa Mesir mengandalkan saudara-saudaranya di dunia Arab untuk memaksa Ethiopia agar menghentikan praktik sepihaknya yang tidak kooperatif dan menunjukkan kemauan politik yang diperlukan untuk mengambil salah satu solusi tengah yang telah diajukan dalam perundingan, dan telah terbukti sepenuh-nya memenuhi kepentingan ekonomi Ethiopia tanpa merugikan nasib rakyat negara-negara hilir" (Halaman Resmi Kementerian Luar Negeri Mesir, 2023).

Upaya sekuritisasi ini bisa diklasifikasikan sebagai sekuritisasi pengaturan agenda. Dalam penggalan teks di atas, kita dapat mengidentifikasi tindak tutur mengeklaim, memperingatkan, dan menyarankan. Sameh Shoukry pertama-tama mengeklaim bahwa Bendungan GERD memiliki dampak yang fatal bagi Mesir. Tindak tutur memperingatkan tidak disampaikan secara gamblang. Akan tetapi, kenyataan bahwa ia membawa masalah ini ke dalam sidang Liga Arab menyiratkan bahwa ia ingin memperingatkan dampak Bendungan GERD terhadap negara-negara Arab. Tidak mungkin ada negara yang membahas masalah yang bukan masalah regional di dalam forum organisasi regional. Kalaupun masalah tersebut pada dasarnya bukan masalah regional, berarti negara tersebut hendak menjadikannya masalah regional. Ia selanjutnya menyarankan negara-negara anggota Liga Arab untuk bersama-sama menekan Etiopia agar menghentikan unilateralismenya dan mendorong negara tersebut untuk mau menyepakati kesepakatan yang mengikat semua pihak secara hukum.

Sebagaimana yang bisa dilihat pada pembahasan di bagian sebelumnya, Mesir tampak memiliki posisi yang cenderung ambigu. Terdapat kontradiksi di dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Mesir. Sebagai contoh, Presiden Mursi menyatakan bahwa Mesir dengan cara apapun, meski harus menumpahkan darah, akan melindungi hak yang Mesir miliki atas sumber daya air Sungai Nil. Namun, ia juga menyatakan bahwa semua opsi masih terbuka dan Mesir tidak ingin berperang. Singkatnya, Mesir, di satu sisi, melakukan upaya sekuritisasi, tetapi, di sisi lain, juga mendesekuritisasi isu ini.

Peneliti berargumen apa yang terlihat sebagai desekuritisasi, sebetulnya adalah bagian dari upaya sekuritisasi. Mesir terkadang memperhalus "nada bicaranya" untuk bisa membangun citra yang baik di hadapan audiens dan masyarakat internasional. Mesir ingin dilihat sebagai negara yang cinta damai dan peduli dengan keamanan regional dan

internasional. Harapannya adalah Mesir akan mendapatkan simpati dan dukungan yang dapat meningkatkan kemungkinan berhasilnya upaya sekuritisasi.

Penting untuk diingat bahwa kunci kesuksesan sekuritisasi terletak pada respons audiens. Oleh karena itu, aktor akan berusaha untuk mengambil hati audiens agar wacananya diamini oleh mereka. Pada bagian ini peneliti menggunakan konsep persegi ideologi untuk mendeskripsikan cara Mesir merepresentasikan dirinya dan Etiopia guna membangun citra yang baik.

Boleh jadi konferensi pers yang dilakukan Mesir seusai sidang Dewan Keamanan PBB pada 2021 adalah contoh terbaik yang bisa digunakan untuk menunjukkan cara Mesir merepresentasikan dirinya dan Etiopia. Kita bisa menemukan bahwa Sameh Shoukry berusaha menonjolkan sisi positif Mesir dan sisi negatif Etiopia, dan sebaliknya mengesampingkan sisi negatif Mesir dan sisi positif Etiopia.

Ketika ditanya oleh seorang jurnalis mengenai kemungkinan Mesir melakukan aksi militer terhadap Etiopia untuk menyelesaikan konflik kepentingan atas Bendungan GERD, Sameh Shoukry menjawab:

> "*The matter of Egypt's protection of the rights of its citizens is inherent and is a matter that necessarily any responsible government would apply itself to. We have been in negotiation now for ten years. We have indicated our good faith, our flexibility.*" (United Nations, 2021).

Sameh Shoukry tidak menjawab apakah Mesir akan mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi Etiopia atau tidak. Sebagai seorang diplomat ia tentu saja akan memberikan jawaban yang diplomatis, apalagi ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Sameh Shoukry justru mengatakan bahwa Mesir adalah negara yang bertanggung jawab atas hak-hak warga negaranya, dalam hal ini adalah hak atas keamanan air. Ia juga menyatakan bahwa Mesir memiliki iktikad baik dan telah bersikap fleksibel selama bernegosiasi, meskipun negosiasi telah berlangsung selama kurang lebih satu dekade masih belum membuahkan hasil. Dengan memberikan jawaban yang demikian, Sameh Shoukry berusaha menonjolkan sisi positif Mesir: bertanggung jawab, punya niat baik, dan fleksibel.

Ketika berbicara tentang Etiopia, Sameh Shoukry berusaha menonjolkan sisi negatif negara tersebut.

> "*The unilateralism that is being displayed by Ethiopia threatens the water security of Egypt and Sudan. It does imperil the livelihoods of 150 million inhabitants …*" (United Nations, 2021).

Ia menggambarkan Etiopia sebagai negara yang egois dan tidak peduli dengan negara lain. Keegoisan dan ketidakpedulian tersebut membahayakan kelangsungan hidup warga Mesir dan Sudan.

Sameh Shoukry juga berusaha mengesampingkan sisi negatif Mesir. Ia menyatakan:

> "*We believe that, again, the statements made related to colonial nature of–that has been inflicted on Ethiopia is, again, fallacious and unhelpful and does not conform to reality*" (United Nations, 2021).

Etiopia menuding Mesir menggunakan hukum buatan era kolonial, yakni perjanjian tahun 1929 dengan pemerintah kolonial Inggris, untuk mempertahankan status quo dan hegemoninya atas Sungai Nil (Lewis, 2019). Tudingan tersebut lalu dibantah oleh Sameh Shoukry dengan mengatakan bahwa hal itu keliru dan tidak membantu mengatasi masalah yang ada.

Menyinggung Menteri Air Etiopia, Sameh Shoukry berkata:

> "*As the Minister of Water of Ethiopia said, he seems very willing to embark upon negotiations, that he is equally unwilling to*

> *terminate [the negotiation], to come to a conclusion. If that is the tactic that there has been for the last decade, then I don't see any resolution of the conflict.*" (United Nations, 2021).

Kalimat di atas bertujuan untuk mengesampingkan sisi positif Etiopia. Bagian awal dari kalimat tersebut tampak seperti pujian kepada Etiopia karena telah mau bernegosiasi dengan Mesir. Akan tetapi, di bagian selanjutnya Sameh Shoukry menyebut Etiopia tidak kooperatif di dalam perundingan dan tidak ingin mencapai sebuah kesepakatan akhir. Sameh Shoukry mengesampingkan sisi positif Etiopia, yaitu mau bernegosiasi, dengan menyebut Menteri Air Etiopia tidak mau membuat kesepakatan. Sameh Shoukry juga secara tidak langsung menyalahkan Etiopia atas tidak terselesaikannya sengketa.

Sekuritisasi ada "untuk seseorang dan untuk sesuatu," sehingga sekuritisasi tersebut bisa "memberikan kuasa, privilese, dan posisi kepada sebagian orang dan mengesampingkan sebagian lainnya" (Salter, 2011: 122). Barangkali tujuan utama Mesir melakukan upaya sekuritisasi adalah untuk mempertahankan hegemoninya atas sumber daya air Sungai Nil. Mesir, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa penelitian, adalah hidro-hegemon di kawasan Basin Sungai Nil (lihat Rahman, 2012; Nasr dan Neef, 2016; Tekuya, 2020; Pemunta, Ngo, Djomo, Mutola, Seember, Mbong, dan Forkim, 2021).

Pada mulanya, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan basin Sungai Nil, Mesir adalah negara yang memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih dalam mengelola sumber daya air. Ini menyebabkan adanya asimetri kekuasaan. Akan tetapi, asimetri ini mulai berubah sejak tahun 1990-an, tepatnya sejak *Nile Basin Initiative* (NBI) dibentuk sebagai wadah kerja sama negara-negara di kawasan tersebut (Cascão dan Nicol, 2016).

Perubahan asimetri kekuasaan tersebut benar-benar terbukti pada tahun 2011 ketika Etiopia memulai proyek Bendungan GERD. Bendungan GERD memberikan Etiopia kapasitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya air Sungai Nil. Dengan demikian, posisi Etiopia dalam hidropolitik Sungai Nil akan semakin kuat, sehingga Etiopia akan mampu menandingi kekuasaan Mesir. Hal ini sejalan dengan argumen Mingst, Mckibben, dan Arreguín-Toft (2019), yaitu bahwa "negara yang memiliki sumber daya alam yang berharga … memegang kuasa atas negara yang tidak memilikinya" (hal. 126). Singkatnya, Mesir melakukan upaya sekuritisasi, karena tidak ingin hegemoninya berpindah ke tangan Etiopia.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan adalah upaya sekuritisasi yang Mesir lakukan memiliki beberapa fungsi, antara lain (1) memberi deterens, (2) mengatur agenda, dan (3) melegitimasi tindakan di masa depan. Jenis sekuritisasi yang paling banyak dilakukan oleh Mesir adalah memberi deterens, sedangkan yang paling sedikit adalah melegitimasi tindakan di masa depan. Aman bagi kita berasumsi bahwa Mesir tidak ingin berperang dengan Etiopia. Mesir hanya ingin menggertak Etiopia, sehingga negara tersebut mau bernegosiasi dan pada akhirnya menyepakati kesepakatan yang mengikat secara hukum. Mesir juga berusaha memperoleh dukungan dari negara-negara lain dengan menjadikan isu ini sebagai agenda regional, bahkan internasional.

Berbicara tentang dukungan, Mesir juga mencoba menggalang dukungan internasional dengan membangun citra yang baik. Ini dilakukan dengan menonjolkan sisi positif Mesir dan mengesampingkan sisi negatif yang

dimilikinya, serta, sebaliknya, menonjolkan sisi negatif Etiopia dan mengesampingkan sisi positif negara tersebut. Dengan demikian, masyarakat internasional akan lebih bersimpati kepada Mesir daripada kepada Etiopia. Dengan simpati dan dukungan tersebut Mesir akan dapat memberikan Etiopia tekanan yang lebih besar.

Kita bisa berasumsi bahwa tujuan utama yang ingin Mesir capai melalui sekuritisasi adalah mempertahankan posisinya sebagai hidro-hegemon. Terlepas dari apakah Bendungan GERD mengancam keamanan air Mesir atau tidak, yang jelas adalah Etiopia kini memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya air Sungai Nil dengan lebih optimal. Hal tersebut akan meningkatkan kekuatan Etiopia dan membuatnya mampu menyaingi Mesir. Barang tentu Mesir tidak ingin kekuasaannya tersaingi oleh negara manapun, sehingga Mesir melakukan upaya sekuritisasi sebagai cara untuk mempertahankan hegemoninya.

Karena bertujuan untuk menganalisis upaya sekuritisasi, penelitian ini hanya berfokus pada upaya-upaya yang Mesir lakukan sebagai aktor. Untuk menilai kesuksesan upaya sekuritisasi tersebut, kita perlu menelaah respons audiens. Berdasarkan apa yang telah dibahas, kita bisa mengatakan bahwa sejauh ini Mesir belum berhasil melakukan upaya sekuritisasi, karena Etiopia masih tidak mundur selangkah pun dan kesepakatan masih belum tercapai. Meskipun begitu, tetap diperlukan penelitian lanjutan mengenai respons audiens dalam kasus ini. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas sekuritisasi Mesir.

Efektivitas bukanlah hal yang dikotomis: efektif dan tidak efektif. Namun, efektivitas terdiri dari derajat yang berbeda-beda. Etiopia memang tetap melanjutkan proyek pembangunan bendungan hingga selesai dan bisa beroperasi penuh. Namun, boleh jadi jika bukan karena Mesir berusaha menyekuritisasi bendungan tersebut, Etiopia tidak akan mau bernegosiasi. Barangkali Etiopia sebetulnya telah berkompromi dengan sedikit mengubah rancangan proyeknya untuk bisa mengurangi dampak yang bendungan tersebut timbulkan dan itu dilakukan karena adanya tekanan dari Mesir. Kita tidak bisa mengetahui itu semua dengan pasti, kecuali dengan melakukan penelitian lanjutan.

Daftar Pustaka

Abtew, W., dan Dessu, S. B. (2019). *The Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Blue Nile*. Springer International Publishing.

Aljazeera. (2021, 30 Maret). *Egypt's Sisi Warns Ethiopia Dam Risks 'Unimaginable Instability'*. https://www.aljazeera.com/news/2021/3/30/egypts-sisi-warns-ethiopia-dam-risks-unimaginable-instability

Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford University Press.

Brown, G., dan Yule, G. (1983). *Discourse Analysis*. Cambridge University Press.

Buzan, B., Wæver, O., dan de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.

Cascão, A. E., dan Nicol, A. (2016). GERD: New Norms of Cooperation in the Nile Basin?. *Water International*, *41*(4), 550-573. https://doi.org/10.1080/02508060.2016.1180763

Chen, H., dan Swain, A. (2014). The Grand Ethiopian Renaissance Dam: Evaluating Its Sustainability Standard and Geopolitical Significance. *Energy Development Frontier*, *3*(1), 11–19. https://www.academia.edu/7375750/The_Grand_Ethiopian_Renaissance_Dam_Evaluating_Its_Sustainability_Standard_and_Geopolitical_Significance

Edrees, M. (2020, Juni 30). Letter dated 29 June 2020 from the Permanent Representative of Egypt to the United Nations Addressed to the President of the Security Council. *United Nations Digital Library*. https://digitallibrary.un.org/record/3871139/files/S_2020_617-EN.pdf?ln=en

Egypt Today. (2017, 18 November). *No One Can Touch Egypt's Share of Nile Water: Sisi on GERD*. https://www.egypttoday.com/Article/1/33081/No-one-can-touch-Egypt's-share-of-Nile-water-Sisi

Hailu, S. (2018). Grand Ethiopian Renaissance Dam and Ethio-Egyptian Hydro-Political Relations: The Interplay between Securitization and De-securitization. *Abyssinia Journal of Business and Social Sciences*, *3*(2), 1–8. https://abjol.org.et/index.php/ajbs/article/view/170

Halaman Resmi Kementerian Luar Negeri Mesir. (2021, 15 Juni). نص كلمة وزير الخارجية أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة [*Teks pidato Menteri Luar Negeri di hadapan sidang luar biasa Dewan Liga Arab tingkat menteri untuk membahas isu Bendungan Renaisans*]. Facebook. https://web.facebook.com/MFAEgypt/posts/pfbid0iKJxpDFQUS2djHb8sEMxjPSUN3Fh1xbnwWyhLkF9h9Poc1G7eYCe4hvNxTx3KE1vl

Halaman Resmi Kementerian Luar Negeri Mesir. (2023, 8 Maret). كلمة السيد سامح شكري وزير الخارجية أمام الدورة ١٥٩ للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية برئاسة مصر [*Ini adalah pidato dari Bapak Sameh Shoukry, Menteri Luar Negeri Mesir, pada sesi ke-159 dari Rapat Menteri Dewan Liga Arab di bawah kepemimpinan Mesir*]. Facebook. https://web.facebook.com/MFAEgypt/posts/pfbid02H61AagJ7fBVmNn3PgNAejQhdjyZG4owJvPED6zkUrZ5mnEWuC5zsoHNygHLFWecal

Lewis, A. (2019, 8 Oktober). *Ethiopia Says Egypt Trying to Maintain "Colonial Era" Grip over Nile*. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-dam-idUSKBN1WN1OG

Mingst, K. A., McKibben, H. E., dan Arreguin-Toft, I. M. (2019). *Essentials of International Relations* (Edisi ke-8). WW Norton & Company.

Mohdar, M., Dharmiasih, D. A., dan Prameswari, A. A. A. I. (2019). Alasan Pemerintah Etiopia Membangun Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Kawasan Sumber Daya Air Lintas Batas Negara. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, *1*(1), 1–13. https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/46066

Nasr, H., dan Neef, A. (2016). Ethiopia's Challenge to Egyptian Hegemony in the Nile River Basin: The Case of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. *Geopolitics*, *21*(4), 969-989. https://doi.org/10.1080/14650045.2016.1209740

Pemunta, N. V., Ngo, N. V., Fani Djomo, C. R., Mutola, S., Seember, J. A., Mbong, G. A., dan Forkim, E. A. (2021). The Grand Ethiopian Renaissance Dam, Egyptian National Security, and Human and Food Security in the Nile River Basin. *Cogent Social Sciences*, *7*(1), 1875598. https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1875598

Perry, T., dan Macdonald, A. (2013, 11 Juni). *Egypt "War" Talk Raises Ethiopia Nile Dam Stakes*. Reuters. https://www.reuters.com/article/ethiopia-egypt-nile-war-idINDEE9590FJ20130610

Piliero, R. J. (2021, 5 Juni). *Ethiopia's Grand Renaissance Dam: Assessing China's Role*. U.S.-China Perception Monitor. https://uscnpm.org/2021/06/05/gerd-assessing-chinas-role

Rahman, M. A. (2013). Water Security: Ethiopia–Egypt Transboundary Challenges over the Nile River Basin. *Journal of Asian and African Studies*, *48*(1), 35-46. https://doi.org/10.1177/0021909612438517

Rena, N. M. R. B., Putri, P. K., dan Resen, P. T. K. (2020). Konstruksi Opini Publik Sekuritisasi Terorisme 9/11 Pemerintah Amerika Serikat Melalui Media Massa. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, *1*(1), 1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/60724/35086

Salter, M. B. (2011). When Securitization Fails: The Hard Case of Counter-terrorism Programs. Dalam T. Balzacq (Ed.), *Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve*, (hal. 116–131). Routledge.

Searle, J. R. (1979). *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts*. Cambridge University Press.

Swain, A. (1997). Ethiopia, the Sudan, and Egypt: The Nile River Dispute. *The Journal of Modern African Studies*, *35*(4), 675–694. https://doi.org/10.1017/S0022278X97002577

Tekuya, M. (2020). The Egyptian Hydro-Hegemony in the Nile Basin: The Quest for Changing the Status Quo. *The Journal of Water Law*, *26*(2), 10-20. https://ssrn.com/abstract=3680312

United Nations. (2021, 9 Juli). *Egypt on the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) - Media Stakeout (8 Jul 2021)* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4jJRB6mtDgs&t=11s

van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. SAGE Publications.

Vuori, J. A. (2008). Illocutionary Logic and Strands of Securitization: Applying the Theory of Securitization to the Study of Non-Democratic

Political Orders. *European Journal of International Relations*, *14*(1), 65–99. https://doi.org/10.1177/1354066107087767

Wunderlich, D. (1980). Methodological Remarks on Speech Act Theory. Dalam J. R. Searle, F. Kiefer, dan M. Bierwisch (Eds.), *Speech Act Theory and Pragmatics*, (hal. 291–312). D. Reidel.